

SORA

KEKELENGEN

EDISI XXV-2024

**JL. JAMIN GINTING KM 45 DESA SUKAMAKMUR
KECAMATAN SIBOLANGIT
KAB. DELI SERDANG
20357 SUMATERA UTARA
INDONESIA**

UNTUK KALANGAN SENDIRI



ERIN
aw
argaka
age Re



Yayasan Ate Keleng GBKP



Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP



Yayasan Ate Keleng GBKP

Tim Redaksi

Penanggung Jawab -

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

Redaksi Pelaksana -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Design Graphics / Editor -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Distributor & Kontributor -

Rupina Br Purba, S.PAK
Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd
Indah Permatasari Br Tarigan, S.Sos
Eninta Barus, S.Sos
Vionna Clarissa Br Ginting, S.H
Guntur Tarigan
Silvia Agnes Yolani, SPt
Windi Karolina Yoanita, SE
Selly Evianta, SM

- Pemimpin Redaksi

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

- Staf Redaksi

Lesmawati Br Perangin-Angin, Amd
Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP
Corry Anggreyny br Ginting, S.Hut
Jenni Efrida Br Sembiring, S.Pd
Lasendri Br Tumanggor
Esterina Br Tarigan
Abdi Tarigan
Lestari Br Sitepu, SE
Yuni Sartika Ginting, SE

- Keuangan

Dea Dwinta Putri Br Bangun, SE
Egia Nina Veronika, Amd
Priska Tarigan, S.Kom

Ir. Leader Suriawan Tarigan
Adi Anggraha Tarigan, S.Hut
Timotius Natanael Perangin-angin,S.Hut
Sriulina Br Sembiring, S.Tr.P
Setia Budi Sembiring
Kaisar Tarigan
Armin Ginting
Jusmiaty Br Tarigan

Alamat Redaksi

Jl. Jamin Ginting Km. 45 Desa Sukamakmur, Kecamatan
Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 20357 Sumatera Utara
Indonesia

 (0628) 97267 |  0821 6555 2744

Apa Itu Fundraising ?

Oleh : Dea Dwinta Bangun, SE



Fundraising = Penggalangan Dana

Penggalangan dana berarti melibatkan/memobilisasi orang dan organisasi untuk mendukung perubahan sosial dengan uang, jasa, barang, pengetahuan, waktu dan dukungan moral. Oleh karena itu, penggalangan dana lebih dari sekedar penggalangan uang. Penggalangan dana juga merupakan ajakan masyarakat untuk turut serta memberikan kontribusi terhadap perubahan positif di masyarakat.

Banyak orang mengartikan fundraising adalah hal yang memalukan karena meminta-minta dana/uang. Padahal fundraising tidak memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka minati. Fundraising tidak mengemis ataupun melecehkan. Fundraising itu membuat orang merasa menjadi bagian dari komunitas tempat mereka tinggal atau bekerja.

Berdasarkan data dari Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2023, Indonesia didapuk sebagai negara dengan tingkat kedermawanan paling tinggi. Hasil penelitian CAF menunjukkan delapan dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini, sementara tingkat kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia. Besarnya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia diikuti juga dengan banyaknya aksi donor, fundraising, hingga crowdfunding. Masyarakat dihadapkan dengan berbagai pilihan media atau platform penyedia donor.

Pada tanggal 11-15 agustus 2024 YAK dan Mitra BfdW lainnya diseluruh Indonesia diundang HMC Consultan sebagai peserta workshop Fundraising yang dilakukan di Hotel Salak Heritage Bogor sebagai tindaklanjut workshop daring yang diadakan The Smile Foundation tahun 2022 lalu. Donor BfdW berharap bahwa setiap mitra nya untuk bisa memiliki Fundraising sendiri selain dari BfdW dengan pertimbangan tren pendanaan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) di Indonesia:

- Menurunnya hibah lembaga donor internasional
- Berkembangnya kegiatan filantropi dan CSR
- Diversifikasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya/sumbangan
- Membaiknya hubungan dan meningkatnya kemitraan perusahaan dengan OMS

- Berkembangnya mobilisasi sumber daya untuk memanfaatkan filantropi dan CSR
- Transformasi kegiatan mobilisasi sumber daya dari konvensional ke digital
- Meningkatnya dukungan dan kemitraan pemerintah pada OMS
- Skema dukungan berkembang dari grant/hibah ke financing (pinjaman) dan investing (investasi)



Jadi apakah itu Fundraising?

Fundraising adalah 4B (Buka mata, Buka Pikiran, Buka Hati, Buka Dompot)



Buka mata: artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan yang mereka hadapi dalam arti mengedukasi terhadap masalah dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Buka Pikiran: artinya menyadarkan masyarakat bahwa persoalan ini masalah kita semua karena menyangkut bumi dan sekitarnya.

Buka Hati: artinya mengemas program dan kegiatan secara menarik dan menyentuh hati.

Buka Dompot: artinya masyarakat sadar dan tertarik sehingga menyumbangkan dana, tenaga dan pikiran.

Ada Tahapan Fundraising yang harus di perhatikan:

1. **Penyiapan Organisasi,** antara lain: membangun tim, menetapkan kebijakan, etika, sarana dan prasarana.
2. **Perumusan Program,** ialah identifikasi masalah dengan 5W+1H (What, where, when, who, why, how), menentukan kebutuhan anggaran, lalu mengemas program dengan tagline yang menarik, visualisasi, audio dan mekanisme menyumbang/mendukung.
3. **Penentuan Donatur/Mitra,** dengan prinsip 3K: Koneksi, Kepedulian/Kepentingan dan Kemampuan untuk membangun database donatur/mitra.
4. **Penetapan Metode Fundraising,** dengan 2 Metode yaitu:
 - Direct Fundraising:* galang dana melalui pemberian donasi langsung dalam bentuk uang, barang, dll.
 - indirect Fundraising:* galang dana melalui pemberian donasi tidak langsung melalui membeli produk (makanan, souvenir,

baju, kalender,dll), membayar jasa, kontribusi pelatihan, lokakarya, jasa konsultasi, serta berpartisipasi dalam event/amal.

- 5. **Perawatan Donatur/Mitra**, ialah menjaga hubungan baik dengan donatur, selalu kasih kabar tentang kegiatan penggalangan dana yg sudah berjalan/dilakukan.

Dalam melakukan Fundraising terapkan Prinsip “ATM BCA” :

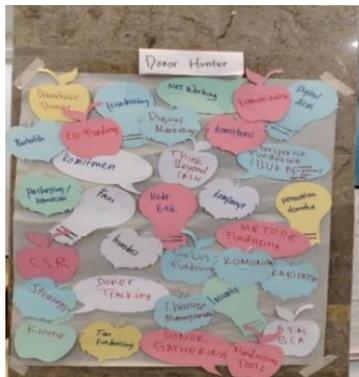
Amati

Tiru

Modifikasi

“Bisa” dengan “cara” “apa saja”

Dan guru terbaik dalam Fundraising adalah



Dan saat ini banyak sekali Portal untuk menemukan calon donor untuk NGO, antara lain:

1. www.fundsforngos.org
2. www.ngoconnect.net
3. www.hrw.org/about/partner-resources
4. www.asiango.org
5. www.bond.org.uk/ngo-support

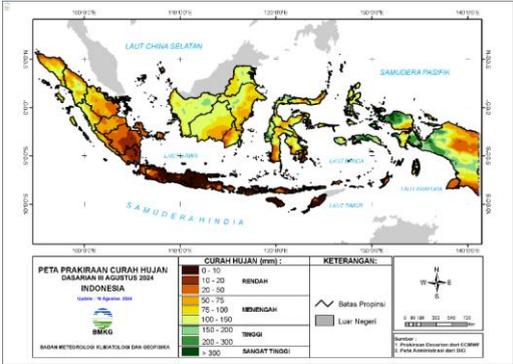
dari berkembangnya teknologi, perubahan zaman, perubahan kebijakan dan tantangan, siap kah kita melakukan Fundraising?

Musim Panen Buah Atau Musim Tidak Menentu?

Oleh: Corry Anggreyny Br Ginting, S.Hut

Akhir-akhir ini banyak desa dampingan Yayasan Ate Keleng merayakan masa musim panen buah yang dominan sebagai pencaharian utama masyarakat adalah Bertani dan berkebun tanaman keras, umumnya buah yang dipanen pada beberapa daerah yang hampir secara keseluruhan sama jenis buahnya seperti durian, manggis, duku, langsung serta rambutan. Dibeberapa daerah yang dikunjungi musim panen raya ini ada yang maksimal ada juga yang biasa bahkan ada juga yang tidak maksimal, pada tahun ini khususnya musim buah ini hampir secara bersamaan berbuah berbeda dari biasanya berbuah secara bertahap sehingga musim panen raya biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember (Hasil Analisa Komunitas ToT PACDR 1-7 Juni 2024) sedangkan pada tahun ini mungkin saja sampai bulan Oktober pun sudah habis masa panen raya buah tersebut. Inilah yang dinamakan dengan fenomena musim yang saat ini terjadi sangat sulit untuk memprediksi perubahan musim dan cuaca, pergantian cuaca antara hujan dan kemarau saja dalam satu bulan bisa sulit diprediksi apakah akan hujan atau akan kemarau. Perubahan musim ini juga berdampak dengan kondisi kesehatan masyarakat akibat perubahan musim dan perubahan cuaca, hal ini tentunya berkaitan dengan kondisi musim hujan dan kemarau yang sulit diprediksi. Berikut adalah perkiraan curah hujan di wilayah Indonesia untuk bulan Agustus

2024 jika dilihat dari peta bahwa rata rata curah hujan di wilayah Indonesia mengalami hujan dengan curah hujan menengah yang tentunya berkaitan dengan potensi banjir bulanan di Indonesia yang dilihat hampir sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami potensi banjir menengah sebanding dengan perkiraan curah hujan yang ada.



Sumber Foto: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika-
Perkiraan Curah Hujan Bulanan 2024



Sumber Foto: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika-
Perkiraan Potensi Banjir Bulanan 2024

Salah satu langkah adaptasi dan mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang demikian adalah dengan menjaga kesehatan melalui banyak minum dan menjaga makan. Langkah adaptasi adalah langkah penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan untuk mempertahankan kehidupan, sedangkan langkah mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengenali dan menyadari resiko untuk membuat langkah penanggulangan. Langkah mitigasi dan adaptasi bisa dilakukan untuk pribadi, komunitas dan desa juga negara, salah satu langkah adaptasi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan jaket pada saat terjadi hujan untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap stabil sedangkan langkah adaptasi yang bisa digunakan untuk mempertahankan kehidupan dengan kondisi cuaca yang sudah tidak terprediksi lagi adalah dengan menanam tanaman pelindung bagi tanaman pertanian, melakukan pemupukan secara rutin untuk menjaga kondisi tanaman tetap dapat dipanen secara maksimal.



Berbicara tentang perubahan iklim yang merupakan isu hangat yang banyak dibicarakan dari banyak pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tentunya merasakan dampak yang terjadi.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini bumi kita sedang menghadapi **Triple Planet Challenges** yaitu perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan polusi. Kenaikan suhu udara menyebabkan panas ekstrem terjadi diberbagai wilayah di belahan dunia salah satunya adalah Indonesia dimana Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Climate Ambition Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ambisi Perubahan

Iklim yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York pada Bulan September 2023 sebagai bagian dari pertemuan Majelis Umum PBB menyatakan bahwa **“*Huminity has opened the gates of hell*”** yang artinya **“Kemanusiaan telah membuka gerbang menuju neraka”**. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi masalah besar yang sangat serius dan genting dan perlu perhatian semua negara (Sumber: Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples, KLHK 12 Januari 2024) jadi tidak heran bahwa pada pidato Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 yang mengatakan bahwa **“Dunia Menuju kepada Neraka Iklim”** oleh sebab itu semua pihak harus ambil bagian dan fokus dalam melakukan langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terjadi. Contoh perubahan iklim yang paling dirasakan contohnya saat ini adalah perubahan suhu udara, di beberapa desa dampingan Yayasan Ate Keleng yang dinilai mengenai perubahan suhu udara hampir secara keseluruhan mengatakan kondisi suhu saat ini sudah meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya hal ini relevan dengan data hasil monitoring suhu rata-rata di Indonesia yang dilakukan oleh BMKG yang menilai bahwa secara

umum di Indonesia mengalami kenaikan 0,5°C dibanding suhu normalnya dan faktanya suhu udara rata-rata bulan Juni lalu merupakan suhu yang tertinggi pertama untuk bulan yang sama sejak tahun 1981 sehingga tidak heran hampir seluruh masyarakat menilai bahwa kenaikan suhu ini sudah signifikan terasa dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Contoh perilaku yang tidak baik yang berdampak terhadap perubahan iklim adalah efek rumah kaca yang diibaratkan seperti berada dalam sebuah mobil yang terparkir terkena paparan sinar matahari panas, pembakaran hutan dan lahan, dan salah satunya adalah hal yang paling sering dilakukan oleh banyak masyarakat yang sering dianggap solusi padahal justru menjadi penyumbang besar dalam perubahan iklim yaitu Pembakaran sampah rumah tangga. Hampir semua masyarakat menganggap bahwa membakar adalah solusi dalam menanggulangi masalah sampah rumah tangga yang sulit menemukan solusi padahal faktanya ini juga menyumbang perubahan iklim. Oleh sebab itu perlu ada solusi yang dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga yang secara sederhana dapat dilakukan sehingga secara personal masyarakat bisa mengurangi laju perubahan iklim dimulai dari rumah tangga, yaitu Mandiri Kelola Sampah Rumah Tangga. Dimulai dari mengumpulkan sampah, membiasakan diri memilah sampah yaitu memisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik, kemudian sampah rumah tangga dengan memanfaatkan sampah organik contohnya kulit buah yang saat ini lagi banyak dipanen menjadi bahan pupuk organik padat dan cair, mengelola

sampah rumah tangga menjadi Ecoenzym juga mengelola limbah rumah tangga seperti limbah cucian beras yang mengandung banyak manfaat untuk pertanian dengan mengelola menjadi Jakaba (Jamur Keberuntungan Abadi) serta memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat menanam apotek hidup yaitu memulai menanam tanaman obat yang paling sering dibutuhkan di rumah dan ini tentunya menyumbang pembentukan iklim mikro yang nyaman bagi masyarakat serta sebagai langkah adaptasi dan langkah mitigasi perubahan iklim.



Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah
Tangga Menjadi Ecoenzym di Laja, 16
Januari 2024



Contoh Pemanfaatan sampah anorganik
menjadi Ecobrick dan dimanfaatkan
sebagai penyangga tanaman bunga oleh
ibu Arlino Br Ginting (Buluh Awar)

Studi Visit Divisi LHPOP Dan Divisi LHPPS Ke LPM JAMTANI Pangandaran

Oleh Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP

Dalam rangka meningkatkan kapasitas staf Yayasan Ate Keleng khususnya Divisi LHPOP dan LHPPS maka pada tanggal 11 – 14 Agustus 2024



dilakukan kunjungan belajar ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat JAMTANI yang berada di Pangandaran Jawa Barat.

Lembaga ini merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki donor dan beberapa fokus kegiatan yang sama dengan YAK. Salah satu program utama di lembaga ini yaitu terkait upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana iklim.

Hal ini disebabkan oleh tingginya resiko bencana banjir yang melanda daerah ini mengingat wilayah ini berada di wilayah pesisir pantai.

Kunjungan awal dilakukan di KWT Srikandi Mandiri Desa Bojong. Kelompok ini memiliki usaha



pengolahan honje (acem patikala) menjadi jus. Hal ini diinisiasi karena pada saat terjadi banjir, petani tidak bisa bercocok tanam

dikarenakan lahan yang terendam banjir. Saat ini jus honje sudah menjadi icon Pangandaran.

Kunjungan berikutnya dilakukan di Kelompok Home Industri Mukti



Rahayu, Desa Paledah. Kelompok ini bergerak dalam usaha pembuatan keripik pisang siam dan jus honje yang di mix dengan lidah buaya. Di tempat ini peserta bisa melihat proses pembuatan keripik pisang asin dan keripik pisang keriting serta melakukan praktek membuat jus honje. Selanjutnya, peserta mengunjungi Kelompok Taruna Tani

Mekar Bayu Desa Ciganjeng yang memiliki usaha budidaya anggur.

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2012. Kegiatan awal di kelompok ini adalah penanaman padi apung yang



merupakan salah satu upaya untuk adaptasi terhadap bencana iklim banjir. Saat ini kelompok ini fokus pada kegiatan budidaya anggur dan pemanfaatan lahan pekarangan. Hal yang menarik yang dilihat di kelompok ini adalah akses kelompok terhadap anggaran pemerintah mudah dan anggur yang dibudidayakan dapat berbuah setiap saat.



Pada hari berikutnya, peserta melakukan kunjungan ke secretariat JAMTANI. Di tempat ini peserta bisa melihat climate field lab. Di dalam climate field lab ini terdapat kolam bioflog, kandang ayam, kandang budidaya magot, panel surya, pompa tali air, kincir angin, mesin pembuat briket organik, alat pembuatan arang sekam, tanaman anggur dan beberapa bedeng tanaman pekarangan yang berisi tanaman kangkung, lidah buaya, terong, cabe, kubis, dan brokoli. Di tempat ini juga dapat dilihat laboratorium mini yang digunakan untuk penelitian hama dan penyakit tanaman yang ditemukan petani di lapangan.

Ada banyak diskusi menarik terkait best practice yang dilakukan LPM JAMTANI di kelompok dampingan yang dibagikan kepada staf YAK dan hal ini diharapkan dapat diimplementasikan di kelompok dampingan YAK GBKP.



Warga Desa Rambung Baru Dan Bingkawan Menuntut Keadilan Ke KSP, Komnas HAM Dan Ombudsman Di Jakarta, 4 - 8 Agustus 2024

Oleh: Lesmawati Br Peranginangin, Amd



PT. Nirvana Memorial Nusantara adalah penyedia jasa kedukaan terbesar di Asia yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan sekarang telah memiliki lebih dari 20 cabang di 6 Negara Asia yakni Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailan, Vietnam dan China. Di Sumatera Utara, Nirvana Memorial Park merupakan satu-satunya taman kenangan bernuansa resort bertaraf Internasional bagi umat Budha, Kristen dan Katolik dengan luas 75,2 Ha. Nirvana Memorial Nusantara bekerja sama dengan PT Great Eastern Life Indonesia (asuransi jiwa terbesar di Singapura)

Dugaan kasus mafia tanah yang menimpa masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa sekitarnya tentu tidak berdiri sendiri. Ada

kerjasama antara pihak pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, dengan aparat desa dan oknum-oknum lain di desa yang berkolaborasi memuluskan penjualan tanah-tanah masyarakat yang menjadi kaki tangan oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara. Dalam kasus ini, pihak perusahaan telah merusak, menyerobot lahan dengan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Tidak hanya merusak lahan, pihak perusahaan juga telah menggugat masyarakat lewat pengadilan bahkan hingga ke tingkat Kasasi yang mengalahkan masyarakat.

Dalam kasus tersebut terjadi peralihan hak atas kepemilikan tanah di atas tanah masyarakat seluas \pm 75 Ha dengan dalil bahwa PT. Nirvana Memorial Nusantara telah melakukan Akta Jual Beli sebanyak 63 buah sebagai dasar terbitnya 63 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Nirvana Memorial Nusantara. Bahwa tidak ada satupun orang-orang yang bertanda tangan pada ke-63 Akta Jual Beli (sebagai dasar terbitnya 63 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Nirvana Memorial Nusantara) yang merupakan warga Desa Rambung Baru. Orang-orang yang bertandatangan pada ke-63 Akta Jual Beli tersebut bukan warga desa Rambung Baru dan merupakan warga dari desa lain.

Bulan Maret 2023 warga Rambung Baru dan Bingkawan telah menyampaikan perkembangan atas kasus tersebut ke instansi pengambil kebijakan di tingkat nasional seperti KSP, Kemen ATR/BPN, MABES POLRI, Kejaksaan Agung dan KOMNAS HAM di Jakarta. Di bulan maret itu juga, keluar putusan bahwa Mahkamah

Agung Menolak Kasasi dari Kasus Rambung Baru dan Bingkawan. Beberapa bulan kemudian, warga juga telah menerima surat Aanmaining dan Constatering dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ini berarti adanya peringatan akan adanya pengukuran lahan sampai kepada proses persiapan eksekusi bakal dilaksanakan. Namun warga tidak diam dan menunggu. Melalui KTLT, beberapa kali warga berjuang melawan ketidakadilan tersebut dengan aksi-aksi bersama baik di tingkat desa, kabupaten dan priopinsi serta berkomitmen tidak akan berhenti berjuang untuk mendapatkan kembali ak atas tanah mereka yang telah dirampas oleh Mafia Tanah.

Disamping hal di atas, bahwa pada bulan Januari 2023, telah ada pengukuran lahan warga anggota KTLT yang dilakukan oleh BPN Deli Serdang sebanyak 35 hamparan dari 50 hamparan yang diajukan. Namun hasil pengukuran tersebut tidak ada disampaikan kepada kelompok atau kepada warga pemilik lahan. Hal ini menggerakkan warga untuk melakukan aksi ke BPN pada bulan Juni 2024. Hasil yang diperoleh, bahwa hanya 16 hamparan yang ada hasil pengukurannya. Dan ternyata semuanya sudah masuk ke dalam peta lahan PT Nirvana Memorial Nusantara. Saat ini warga bersama dengan pendamping telah menyurati BPN deli serdang untuk melakukan pengukuran lanjutan lahan anggota KTLT termasuk yang anggota baru dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 67 KK. Berdasarkan latar belakang tersebut membuat masyarakat Rambung Baru dan Bingkawan bertambah cemas dan takut akan ruang hidup mereka terancam oleh perusahaan.



Terkait dengan hal itu, Beberapa warga desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Perampasan Tanah (KMSAMT) yaitu Kelompok Tani Lepar

Lau Tengah (KTLT), YAK (Yayasan Ate Keleng), BITRA Indonesia dan BAKUMSU berjuang terus untuk menuntut keadilan ke beberapa instansi/lembaga pengambil kebijakan di Jakarta sebagai upaya penyampaian kondisi terkini kasus dan meminta penjelasan perkembangan penanganan yang dilakukan pemerintah untuk penyelesaian atas konflik tanah yang menimpa masyarakat Rambung Baru dan Bingkawan. Instansi tersebut adalah KSP (Kantor Staf Presiden), Kemen ATR/BPN, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan Ombudsman RI. Selain ke instansi negara tersebut, tim juga melakukan diskusi dengan staf KPA (konsorsium Pembaharuan Agraria) di Jakarta.

Kondisi kasus saat ini, bahwa masyarakat sedang berproses dalam pengaduan masyarakat terhadap PT Nirvana Memorial Nusantara di POLDA SU dengan delik pengaduan adanya indikasi pidana pemalsuan dokumen/surat tanah. Upaya ini dilakukan agar hak atas tanah, hak bersuara dan hak Ekosob masyarakat terpenuhi.

Instansi pertama yang dituju adalah KSP yang diterima oleh Tenaga Ahli Madya Kedepujian II Kantor Staf Presiden Sahat Lumban Raja.



Lesmawati Peranginangin sebagai ketua Koalisi Masyarakat Sipil Anti Perampasan Tanah (KMSAPT) dari YAK menyampaikan harapan warga Rambung Baru dan Bingkawan agar adanya upaya penyelesaian lebih lanjut dari KSP untuk mengembalikan hak Masyarakat. Sudah 2 kali warga datang ke KSP, namun tekanan berupa rekomendasi yang disampaikan ke daerah hanya berjalan sebentar. Tidak ada tindak lanjut dari POLDA SU, Kantah Deli Serdang maupun kanwil pertanahan Propinsi Sumatera Utara.

Hal ini didukung dari penjelasan ketua kelompok tani Lepar Lau Tengah Bengkel Sinuhaji, bahwa permasalahan yang dihadapi dengan PT. Nirvana Memorial Nusantara sangat menyedihkan bagi masyarakat meskipun pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti indikasi pemalsuan dokumen tetapi tidak ada upaya penyelesaiannya, masyarakat masih dipermainkan. Dimana masih terdapat kejanggalan dalam penanganan penyelesaiannya mulai dari daerah hingga pusat.

Perkembangan penanganan kasus konflik agraria tersebut disampaikan oleh tim pendamping KTLT (Kelompok Tani Lepar Lau Tengan) dari YAK, BITRA dan BAKUMSU serta perwakilan warga

kepada lembaga lainnya seperti Komnas HAM, dan Ombudsman. Dari usulan masyarakat, sudah ada hasil pengukuran lahan warga dari Kantor pertanahan (Kantah) Deli Serdang sebanyak 16 bidang tanah yang telah diukur dan ternyata sudah masuk wilayah PT. Nirvana Memorial Nusantara dan semua masuk ke dalam SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara dengan sisa bidang 60 permohonan yang belum diukur. Selanjutnya bahwa Mabes POLRI sebenarnya telah menetapkan pelaku yang dimana berdasarkan fakta dan hasil interogasi polisi di lapangan, pelaku tersebut merupakan seseorang yang memiliki jabatan di pemerintahan yang berhubungan dengan isu pertanahan. Untuk itu tim menekankan bahwa Polisi sudah seharusnya melakukan tindak lanjut dikarenakan sudah adanya bukti yang konkrit terkait pemalsuan dokumen dan pengambilan tanah.



Dari apa yang disampaikan dan yang diharapkan oleh warga, bahwa KSP akan turut membantu dalam menjembatani

komunikasi antara perwakilan masyarakat dengan Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara serta Kementerian/Lembaga terkait, serta berusaha mendorong kementerian/Lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan isu ini. Ditambahkan lagi bahwa KSP juga akan membuat surat rekomendasi sesuai dengan tuntutan

masyarakat ke Mabes Polri, Kantor Pertanahan Deli Serdang, Pengadilan negeri Lubuk Pakam, dan Kementerian ATR/BPN.

Begitu juga dengan hasil pertemuan/pramediasi dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) yang diterima langsung oleh Komisioner



Mediasi Prabianto Mukti Wibowo. KMSAPT menyampaikan harapan agar perusahaan mengembalikan hak atas tanah masyarakat yang telah terbit SHGB di lahan masyarakat. Dari pramediasi tersebut ada beberapa rekomendasi/kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah berita acara , yaitu:

1. Agar kantor pertanahan kabupaten Deli Serdang melanjutkan pengukuran lahan warga di lokasi sengketa di desa Rambung Baru dan Bingkawan.
2. Masyarakat menolak dilaksanakannya rencana konstatering oleh PN Lubuk Pakam dikarenakan dari awal proses peradilan, terjadi ketidakberpihakan pihak pengadilan kepada masyarakat.
3. Proses secepatnya laporan ibu Datten br Karo, Spd di POLDA SU terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen atas penerbitan SHGB PT Nirvana Memorial Nusantara.
4. Komnas HAM RI akan meminta klarifikasi dan informasi kepada Poldas Sumatera Utara mengenai laporan masyarakat dan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menunda konstatering.

5. Komnas HAM RI akan melaksanakan pertemuan prameiasi dengan PT Nirvana Memorial Nusantara untuk meminta informasi terkini atas permasalahan dan alternatif penyelesaian.
6. Komnas HAM RI meminta agar para pihak tetap membangun komunikasi yang baik dan efektif atas permasalahan dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.



Secara prinsip pihak komnas HAM menyarankan akan memfasilitasi agar warga menerima tawaran mediasi dengan para

pihak. Dijelaskan bahwa sebuah mediasi tidak selamanya menghasilkan kesepakatan. Hal itu disampaikan karena secara faktual warga tidak yakin dengan mediasi tersebut hak mereka akan dikembalikan.

Dari upaya yang sudah dilakukan oleh warga bersama dengan pendamping, ada juga beberapa masukan dan dorongan yang diberikan oleh pihak Ombudsman RI khususnya di bidang hukum. Pihak Ombudsman berjanji akan membantu masyarakat melalui pendamping hukum tentunya untuk menyampaikan laporan pengaduan ke pihak terkait.



Dukungan perjuangan masyarakat pun didapatkan dari teman teman dari KPA di Jakarta. Sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh masyarakat di desa Rambung Baru dan Bingkawan. Bahwa akan dilakukan pengukuran lahan warga per persil sebagai data tandingan dengan hasil pengukuran lahan yang akan dilakukan oleh pihak Kantah Deli Serdang yang sudah dimohonkan.



Perjuangan ke instansi di tingkat nasional memang sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dari pengalaman tersebut hasilnya semuanya sementara saja. Aparat pemerintah

terkait yang ada di daerah seperti POLDA dan pertanahan hanya merespon pada saat awal teguran atau surat dari nasional. Setelah itu tidak ada respon yang baik terhadap persoalan warga.

Namun demikian, warga desa Rambung Baru dan Bingkawan tetap berjuang bersama agar hak atas tanah mereka yang sudah dirampas dapat kembali. Bersama KMSAPT, masyarakat



yang tergabung dalam KTLT tetap berkomitmen menempuh upaya apapun untuk mendapatkan perlindungan dan hak mereka. Akan terus mendesak pemerintah untuk bertanggung-jawab atas ketidakadilan yang mereka terima.

CREDIT UNION LAWAN TANDING KAPITALISME II

Sebagai Uraian dari Sebuah Buku Karya Pejuang Credit Union

Oleh: Lestari Br Sitepu, SE

AKSES KREDIT UNTUK RAKYAT



Kalangan ekonomi sepekat, salah satu sebab kemiskinan adalah kurangnya akses kredit bagi kelompok miskin. Untuk itu pemerintah selalu berusaha meningkatkan akses kredit bagi orang kecil. Namun dalam praktiknya, sering sekali kredit program yang dijalankan tidak sampai ke

kelompok miskin, dan lebih banyak menguntungkan banker atau makelar program. Mereka yang miskin dan rentan miskin, tidak berubah nasibnya. Saat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, mereka yang berada di garis kemiskinan langsung terjun bebas menjadi kelompok miskin penerima bansos dari negara.

Pada masa orde baru, ada banyak program skema kredit yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Secara nasional rasio kredit untuk UMKM terhadap keseluruhan total kredit perbankan adalah 19%. Inipun didominasi usaha kecil



dan menengah bukan usaha mikro. Pandemi Covid 19 yang telah merontokkan usaha mikro ini dan diperkirakan jutaan menjadi terpuruk dan menjadi penerima dana bansos.

Akses kredit bertujuan bukan semata untuk memberikan jangkauan akses keuangan bagi si miskin, tetapi lebih dari itu, bagaimana si miskin ini dapat keluar dari kemiskinannya melalui akses keuangan tersebut.

Mematikan koperasi/Credit Union

Dampak yang paling membahayakan bagi perekonomian adalah, adanya kebijakan yang mematikan lembaga keuangan masyarakat serta memunculkan monokulturalisasi keuangan, dengan dominasi peran dari lembaga keuangan milik pemerintah. Kondisi ini membuat krisis



ekonomi melanda, masyarakat kecil akan lebih sulit mempertahankan ekonomi mereka.

Faktanya, baru saja pemerintah mengembangkan kebijakan KUR yang disalurkan melalui bank-bank umum, dengan memberikan subsidi suku bunga, itu membuat koperasi dan lembaga keuangan milik masyarakat sedikit kembang kempis.

Pemerintah seharusnya melihat bahwa lembaga keuangan yang telah hidup dimasyarakat dan eksis dari sejak lama merupakan instrumen penting dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil. Sebut saja Credit Union yang telah hidup tanpa fasilitas kebijakan pemerintah.

Koperasi/Credit Union telah memberikan akses manfaat bagi anggotanya, yang sekaligus menjadi pemiliknya. Lembaga ini walaupun tidak mendapat fasilitas masih tetap aksis. Padahal mereka harus bersaing dengan bank yang mendapat fasilitas istimewa. Apabila lembaga keuangan yang hidup nanti hanya bank umum, maka sudah dipastikan akan banyak kekosongan dari layanan keuangan bagi masyarakat. Ketika terjadi krisis keuangan sewaktu-waktu, ekonomi masyarakat juga berada dalam satu cawan rapuh.

EKONOMI SOLIDARITAS SOSIAL DAN KOPERASI



Dalam menjalankan bisnis di Indonesia ada dua badan hukum privat yang diakui oleh negara yaitu perseroan dan koperasi. Dalam konteks badan

hukum untuk mendirikan persahaan sosial di Indonesia, kebanyakan anak muda memilih perseroan ketimbang koperasi, karena cukup mudah, sementara untuk mendirikan sebuah koperasi ada yang harus menunggu berbulan-bulan dengan sejumlah persyaratan yang sangat banyak.

Koperasi/Credit Union adalah perkumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu yang sama. Itulah hakikatnya, sebagai perkumpulan berbasis orang untuk meraih **nilai manfaat bagi semua pihak, bukan sebagai wahana untuk mengejar keuntungan semata.** Karena itu harus ada upaya serius mendorong lahirnya perusahaan berbasis koperasi/credit union

Koperasi/Credit Union selalu diidentikkan dengan program pembinaan dan pemberdayaan. Praktik anggaran dasar dan rumah tangga yang berhasil, membuat mereka mandiri dan kemudian memberi perlindungan bagi anggotanya yang adalah pemiliknya.

Tetap Semangat , mari bersama memajukan Credit Union. Credit Union Maju, Anggota Sejahtera.

“FAMILY GATHERING YAK GBKP”

“SAMOSIR COTTAGE RESORT”

Oleh : Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom



Bunga Citra
Lestari pernah
meliris lagu
dengan Judul
“Harta Berharga
” didalam lirik
tersebut tersirat
kalimat bahwa

keluarga adalah harta yang paling mahal dari segala-galanya. Demikian yang dirasakan oleh para staf yang bekerja di lembaga Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP selain sebagai seorang pelayan ditengah-tengah masyarakat tentunya juga untuk memenuhi kebutuhan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Jika dihitung-hitung mungkin saja dalam waktu 24 jam waktu satu hari staf YAK lebih banyak berada di tempat pekerjaannya daripada bersama keluarganya di rumah itu sendiri.

Terkadang waktu kebersamaan bersama keluarga inti di rumah tergantikan lebih banyak bersama dengan waktu antar staf. Family gathering YAK GBKP dilaksanakan selain untuk



memupuk waktu kebersamaan dengan keluarga juga dengan staf, sebab tak jarang hubungan antar staf mungkin kurang akur, baik hubungan antar divisi maupun antar tim inti itu sendiri. Hubungan yang tidak akur tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pengelompokan tim dalam sebuah tim internal atau adanya keegoisan dan individualisme dalam sebuah tim. Konflik seperti ini jika terus berlangsung akan berdampak buruk pada kinerja tim. Dalam hal ini, family gathering sangat dibutuhkan untuk mempererat hubungan antara staf satu dengan yang lainnya baik dalam satu tim maupun antara divisi satu dengan divisi yang lainnya.



Guna memupuk kembali waktu kebersamaan bersama keluarga perlu dianggap dibuat suatu kegiatan yang dinamakan dengan family gathering yang dimana dalam kegiatan ini setiap

anggota keluarga inti ikut bergabung untuk yang sudah menikah membawa pasangan suami/istri dan anak. Sebab berada dalam satu organisasi yang sama tetapi bisa saja anggota keluarga satu sama lain tidak saling mengenal.

Family gathering keluarga besar YAK berlangsung selama dua hari. Titik kumpul utama berada di kantor YAK GBKP berangkat bersama-sama dengan kendaraan pribadi dan kendaraan kantor. Sebelum sampai ke Hotel tempat tujuan para rombongan singgah di Patung Sibebea-Bea untuk berpoto bersama. Usai berpoto langsung melanjutkan perjalanan menuju Samsir Cottage Resort. Panitia memberi waktu 40-60 menit saja untuk istirahat di kamar masing-masing.



Untuk menjalin kebersamaan panitia sudah menyiapkan beberapa games kebetulan waktu itu ada mahasiswa *Social Emercion* yang berada di YAK dan mereka ikut membantu untuk mengkoordinir acara yang ada. Para rombongan keluarga ikut bermain baik suami istri dan anak. Dari rencana yang sudah dibuat rombongan ingin pergi ke Waterfront Pangururuan City untuk melihat keindahan air disana. Tetapi karena situasi cuaca yang sedang tidak baik disana (angin kencang) sehingga wahana tersebut tidak beroperasi.

Harapannya kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dapat dimaknai sesuai dengan tema yang diangkat dalam family gathering waktu itu “Berjalan, berjuang, dan selamat bersama keluarga ku (Melalui YAK/PARPEM GBKP).



Pengesahan Perdes Guna Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Terpinggirkan

Oleh : Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa” Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di lingkungan desa.



Perdes diproses secara demokratis dan pasrtisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memeberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh Masyarakat desa dan BPD.

Manfaat Peraturan Desa

1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
3. Memudahkan pencapaian tujuan
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
5. Sebagai dasar penerapan sanksi atau hukuman
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan



Jenis-Jenis Peraturan Desa :

Jenis dan ragam peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintahan Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai

peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan Sebagian besar Masyarakat agar Peraturan Desa dibuat benar-benar aspiratif. Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan penguatan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Beberapa kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng GBKP sudah mengesahkan Perdes terkait masyarakat terpinggirkan, guna menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat



terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, anak, ibu lansia. Salah satu desa yang sudah mengesahkan perdes yaitu Desa Tigapancur Kec. Simpang empat kabupaten karo, Pada tanggal 20 Agustus 2024. Pemdes dan BPD sangat mendukung adanya perdes tersebut disahkannya perdes sebagai panduan dalam meningkatkan kepedulian dan Upaya konkrit pemerintahan guna mewujudkan pemenuhan hak-hak Masyarakat terpinggirkan yang ada didesa.

Perdes yang disahkan di desa tersebut adalah, “Perlindungan Kesehatan ibu dan anak” yang memiliki tujuan untuk;

- a. Mengurangi kematian Ibu hamil
- b. Mengurangi anak kerdil (Sunting)
- c. Mengurangi gizi buruk
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pola hidup sehat.

Serta di desa Tigapancur juga sudah memiliki program pemberdayaan bagi ibu dan anak yang sudah dianggarkan di APBDesa di tahun 2024. Dan untuk kedepannya di harapkan akan ada perdes baru yang akan disahkan di desa ini karna mengingat ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan akan hak-haknya sebagai Masyarakat desa. Hasil



dari kegiatan tersebut diharapkan akan menjadi contoh di desa dampingan YAK lainnya, guna memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan untuk menuju Desa Inklusi.

APB Desa Yang Berspektif Disabilitas

Oleh : Rupina Br Purba S.PAK



Perdes (Peraturan desa) adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan permusyawaratan Desa) dan masyarakat. Perdes yang dibuat ditingkat desa tidak boleh bertentangandengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum . Pemerintahan desa (Pemdes) membuat Perdes untuk melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Pemerintah dan Penyelenggara ditingkat des. Salah satunya Pemenuhan hak dan perlindungan kepada kelompok masyarakat marginal danrentan seperti : penyandang disabilitas, perempuan, Lansia, Anak, Lansia, Odha dan korban bencana. Hal yang sering diabaikan ditingkat desa yaitu pemenuhan hak terhadap kaum disabilitas/difabel bahkan kebutuhannya, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi.

Pemerintahan desa melalui Perdes dapat mengembangkan pembangunan inklusif yaitu : pembangunan yang melibatkan kaum rentan (marginal), salah satunya kaum disabilitas/difabel (membangun perspektif disabilitas). Disabilitas artinya : mengalami keterbatasan intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan (Undang Undang No 8 Tahun 2016) . Disabilitas ada yang bawaan lahir dan ada yang didapat misalnya kecelakaan (patah kaki).



Untuk itu harus ada data disabilitas dan kelompok disabilitas ditingkat desa. Beberapa pembangunan yang belum berspektif disabilitas seperti fasilitas umum (kamar mandi, balai desa, jalan ke kantor desa dll). Penggunaan dana desa secara umum cenderung untuk fisik, ini salah satu penyebabnya karena ketidakhadiran kaum disabilitas dalam musrenbang sehingga tidak ada yang mengajukan program untuk mereka.

YAK GBKP khususnya divisi PPMD (Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa) memiliki program pemberdayaan kaum disabilitas. Langkah awal yang dilakukan yaitu : membangun kerjasama dengan Pemdes di tingkat desa dan memperkenalkan program YAK GBKP dan ditindak lanjuti untuk pendataan jumlah

kaum disabilitas ditingkat desa. Setelah itu dibuat Perdes untuk kaum disabilitas yang disepakati bersama Pemdes dan BPD. Selanjutnya sosialisasikan kepada masyarakat dan disyahkan. Dengan disyahnkannya Perdes tersebut maka diangkat kepengurusan kaum disabilitas dengan nama kelompok dan dikeluarkan SK oleh Kepala desa.

KDD (Kelompok kaum disabilitas) yang sudah syah ditingkat desa maka dalam acara musrenbang sudah diikuti sertakan dan menyuarakan haknya. Sampai saat ini sudah ada beberapa desa yang mengganggu program untuk kaum disabilitas, khususnya untuk desa **Gurukinayan** sudah mengganggu program (dua) 2 program untuk kaum disabilitas:

1. Pelatihan pembuatan sunlight
2. Pelatihan ternak ayam

Selasa, 13 Agustus 2024 dilakukanlah kedua program tersebut dengan mengundang kaum disabilitas untuk hadir di aula kantor kepala desa dengan jumlah peserta 15 orang. Langkah awal yang dilakukan dengan memberikan arahan kepada kaum disabilitas bagaimana membuat sabun cair, ternak ayam muali dari kecil hingga mengembangkannya, pemasarannya. Sebagai narasumber diarahkan oleh team dari Kecamatan yang langsung dari Camat Kecamatan Payung dan YAK GBKP. Selesai arahan dialnjutkan dengan praktek pembuatan sabun cair dan pembagian anak ayam 6 ekor/orang beserta pakan 5Kg/orang sebagai modal awal. .



Kepala desa Gurukinayan
→ **Amelia br Singarimbun**
menjelaskan bahwa tahun
2023 sudah dianggarkan
program untuk kaum
disabilitas, harapan kami
sebagai Pemdes supaya

benar benar ditekuni sehingga dapat menambah ekonomi mereka
dan besar harapan Pemdes supaya musrenbang bulan September
2024 ini hadir dan mengusulkan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Kami sebagai Pemdes akan mendukung pengajuan kaum disabilitas
dalam musrenbang

Camat Payung dan teamnya juga mendukung kegiatan tersebut
dan mengusulkan supaya pemasaran sunlight ini diteruskan ke
kantor Camat, untuk lebel sabun cair ini juga kami akan
membuatnya dan memberikannya kepada kaum disabilitas/difabel
desa Gurukinayan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah :

01. Pemerintahan desa Gurukinayan
02. BPD
03. Pendamping desa
04. Team dari Kecamatan
05. YAK GBKP

“Rencana Aksi dan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah”

Oleh : Timotius Natanael Perangin Angin, S.Hut

Kegiatan *study visit* atau lebih dikenal sebagai kunjungan belajar sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas suatu lembaga dalam upaya peningkatan



capacity building untuk keberlangsungan dan kemajuan lembaga tersebut. Kunjungan belajar dilakukan untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil secara manajemen pengorganisasian maupun secara teknis pelaksanaan suatu objek yang dikelola dari sebuah lembaga. Adapun lembaga yang dipilih pada kunjungan belajar ini adalah Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang berada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. JAMTANI merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/*Non Governmental Organization* (NGO) yang bergerak untuk memberdayakan masyarakat untuk peningkatan ekonomi, sumber daya manusia beserta alamnya yang

berfokus pada kegiatan pertanian dengan menerapkan sistem *permaculture* dan menerapkannya secara organik untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan PROKLIM (Program Kampung Iklim) dan SLI (Sekolah Lapang Iklim).



Sampah dan limbah menjadi momok terbesar dan isu lingkungan yang sangat serius dan menimbulkan dampak yang begitu besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbunan sampah secara nasional mencapai 69 juta ton, dan sebagian besar merupakan sampah yang

dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, dimana sekitar 35% dari timbunan sampah tersebut belum dikelola. Ketidaksiharian pemerintahan setempat dan kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap sampah masing-masing menjadi faktor terbesar dari begitu banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, melalui kegiatan study visit ini perlu dilakukan ke lembaga yang dianggap sudah berhasil dan lebih baik dalam mengadvokasi dan membina masyarakat desa dampungannya dalam mengelola sampah dan limbahnya seperti yang dilakukan JAMTANI melalui *climate field lab*, pembentukan desa PROKLIM dan pembentukan SLI

Padi, SLI sayuran dan SLI pekarangan, yang semuanya menjadi upaya melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



Rencana aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sangat perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat terhadap segala bentuk risiko dan dampak yang akan dihadapi terhadap perubahan iklim. Adaptasi merupakan proses penyesuaian perubahan iklim yang dilakukan

pada masa sekarang untuk persiapan di masa yang akan datang, adapun bentuk dari kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah melakukan penanaman pohon di kawasan hutan, pekarangan maupun mangrove di pesisir pantai, melakukan penghematan penggunaan air. Mitigasi merupakan upaya-upaya yang bertujuan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer, dimana gas rumah kaca yang menumpuk pada atmosfer akan menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas terperangkap dalam permukaan bumi, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi, bentuk dari mitigasi terhadap perubahan iklim tersebut adalah mengelola sampah dan limbah, penggunaan energi terbarukan dan beralih menggunakan moda transportasi umum. Rencana aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan ini sangat perlu untuk diketahui masyarakat sebagai

bentuk penyadaran bahwa kondisi lingkungan dan bumi kita semakin krisis.



JAMTANI dengan enam desa dampungannya yang terdapat di beberapa kecamatan di kabupaten Pangandaran berhasil melakukan pendampingan dan menerapkan beberapa program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di bidang pertanian, seperti yang sudah dijelaskan bahwa program-program oleh pemerintahan berhasil diakses dan diperkenalkan JAMTANI kepada masyarakat dampungannya, sehingga salah satu desa dampingan JAMTANI berhasil mendapatkan predikat PROKLIM (Program Kampung Iklim) melalui pembangunan infrastruktur penggunaan energi terbarukan dalam bentuk kincir dan panel surya (*solar cell*). Pembangunan infrastruktur tersebut diperoleh melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT.PERTAMINA. Kesempatan tersebut dibukakan dan diadvokasi oleh JAMTANI kepada masyarakat. Selain itu ada juga program Sekolah Lapang Iklim, dimana pada beberapa desa dampingan dilakukan SLI padi, SLI sayuran dan SLI pekarangan.

Pada kegiatan Sekolah Lapang Iklim yang dilaksanakan di desa dampingan JAMTANI begitu banyak pemaksimalan pemanfaatan dan pengelolaan sampah, baik sampah organik,

sampah anorganik, limbah padat, maupun limbah cair. Adapun beberapa contoh pemanfaatan sampah organik dan sampah anorganik diantaranya, sampah organik dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan media tanam pembibitan tanaman anggur berupa jerami kering dan hijauan, selain itu pemanfaatan sisa sayuran dan buah menjadi pakan ternak dan ikan yang dibudidayakan dalam biovlog, pemanfaatan sampah anorganik diantaranya pemanfaatan botol air mineral menjadi perangkap hama padi (walangsangit), kemasan minyak goreng menjadi pengganti polybag, jerigen minyak goreng menjadi pot *vertical garden*, ember bekas dan botol air mineral menjadi media SALEMBER (Sayur dan Lele di Dalam Ember) yang merupakan program unggulan di desa dampingan JAMTANI dalam mengadvokasi masyarakat untuk memanfaatkan dana desa program ketahanan pangan. Pemanfaatan limbah padat seperti sekam padi ataupun arang sekam juga dijadikan sebagai media tanam perbanyak tanaman anggur varietas impor, dimanfaatkan juga limbah kotoran ternak sebagai bahan pembuatan kompos dan briket organik yang dikembangkan JAMTANI, disamping itu ada juga pemanfaatan limbah cair seperti urine ternak (kambing, domba) sebagai bahan pembuatan pupuk sebagai penambahan unsur hara sebagai pengganti bahan pupuk kimiawi, penggunaan urine tersebut sedang dikembangkan oleh JAMTANI.



Pemanfaatan sampah dan limbah harus dilakukan secara maksimal untuk mengimplementasikan upaya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, hal ini juga harus diberitakan kepada

seluruh masyarakat agar menyadarkan masyarakat bahwa kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja dan sudah memasuki fase krisis. Harapannya pembaca dan masyarakat dampingan Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP mampu mengimplementasikan dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Mari selamatkan bumi, kalau bukan sekarang, kapan lagi?, kalau bukan kita, siapa lagi?.

Si Merah Mengoda.....!!!

Oleh: Windi Karolina Yoanita, SE

Pernahkah kita mendengar kata “Honje”. Honje sendiri merupakan tanaman yang sangat banyak dijumpai di beberapa daerah tertentu. Namun tidak semua daerah membuat honje memiliki nilai jual, beda halnya dengan didaerah Pangandaran, Honje ini sudah menjadi olahan yang sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan serta menjadi ikon bagi daerah pangandaran. Ada beberapa kelompok Tani perempuan yang menjadikan Honje ini menjadi pemasukan tambahan bagi ekonominya karena banyaknya honje ini tumbuh liar dan membuat kelompok ini berfikir kreatif untuk mengubah honje yang sebelumnya tidak bernilai jual menjadi olahan yang enak dan lezat untuk di makan. Nah jadi untuk teman-teman pembaca setia Sora Kekelengan yang mau mengolah Honje dan menjadikannya menjadi penghasilan berikut adalah cara pengolahannya :



- 1 kg honje di tumbuk
- Air 4 liter
- Gula 700gr (sesuai selera)
- Rebus sampai mendidih tanpa gula
- Setelah dididih rebus dengan gula dan garam sedikit saja

- Kemudian di saring dan siap untuk disantap

Selain itu Jus Honje ini juga sering sekali dipadukan dengan lidah buaya lo, lidah buaya dibuat menyerupai natadecoco, nah beginigini cara pembuatan jelly lidah buaya :

1. Lidah buaya dikupas lalu cuci sampai bersih sampai lendirnya hilang
2. Rendam selama 3 jam
3. Rebus sampai mendidih kemudian buang airnya
4. Lalu rebus untuk kedua kalinya sampai matang, jelly lidah buaya siap untuk dinikmati(kalua ingin manis boleh ditambah gula saat perebusannya)



5. Jelly lidah buaya ini sering dibuat menjadi campuran jus Honje dan rasanya sangat nikmat dan lezat untuk dinikmati saat dingin. Jadi Untuk sobat setia Sora Kekelengen Ayo ubah hal yang tidak bernilai menjadi bernilai.



Pelatihan Ternak Ayam Untuk Disabilitas



Family Gathering Keluarga Besar YAK - Samosir Cottage



Pengesahan Perdes guna menjamin pemenuhan hak-hak Masyarakat terpinggirkan



KTLT, YAK, BITRA Indonesia dan BAKUMSU di instansi/lembaga pengambilan kebijakan di Jakarta



Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Ecoenzym di Laja



Juice Honje



Pelatihan Fundraising